

## RUMAH BAGI PENERIMA HIBAH BSPS (BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA) DI KOTA SEMARANG

Landung Esariti<sup>1</sup>, Fitri Fauziah<sup>1</sup>, Marsella Dwi Putri<sup>1</sup>, Maya Damayanti<sup>1</sup>, Arfan Bakhtiar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedharto Tembalang, Semarang

### Jurnal Riptek

Vol. 14 No. 1 (1 - 10)

Tersedia online di  
<http://riptek.semarangkota.go.id>

### Info Artikel:

Diterima: 4 Juli 2020

Disetujui: 31 Juli 2020

Tersedia online: 16 Agustus 2020

### Kata Kunci:

Pengentasan Kemiskinan, Makna Rumah, Peningkatan Kualitas Hidup

### Korespondensi penulis:

landungesariti@lecturer.undip.ac.id

**Abstrak.** Rumah merupakan instrumen penting dalam pengembangan masyarakat, karena biasanya aktivitas pertumbuhan kota dimulai dari aktivitas ekonomi di dalam rumah. Artikel ini menganalisis dampak dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Semarang, tahun 2018 dan tahun 2019. Tujuan artikel adalah menganalisis makna rumah bagi rumah tangga penerima bantuan, dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner pada 26 keluarga di tahun 2018 dan 36 keluarga di tahun 2019. Lokasi amatan ada pada Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Bulu Lor, dan Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Pongangan, Kelurahan Kudu, Kelurahan Tambakharjo, Kelurahan Plamongsari, Kelurahan Kuningan, dan Kelurahan Dadapsari. Sebagai kesimpulan, ditemukan bahwa rumah memberikan fungsi fisik, sosial dan spiritual bagi peningkatan kualitas hidup keluarga. Fungsi tersebut adalah sebagai tempat pembinaan keluarga, sebagai tempat berteduh, memberikan keamanan dan kenyamanan. Selain itu rumah dapat berfungsi sebagai penguatan status sosial keluarga, dan sebagai tempat untuk menambah penghasilan keluarga melalui kegiatan usaha berbasis rumah.

### Cara mengutip:

Esariti, L; Fauziah, F; Putri, MD; Damayanti, M; Bakhtiar, A. 2020. Rumah bagi penerima hibah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*. Vol. 14 (1) 1 - 10

## PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan krusial yang menjadi fokus penanganan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini terbukti dari adanya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia tahun 2012 sebagai salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan menurut (Jiboye, 2011) berpengaruh pada munculnya kantung-kantung permukiman kumuh dengan kondisi rumah tidak layak huni. Salah satu program dari pemerintah pusat, melalui Kementrian PUPR, untuk pengentasan kemiskinan dengan bantuan renovasi pada rumah tidak layak huni yakni program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui program ini Kementerian PUPR d memberikan dana bantuan yang bersifat stimulan untuk peningkatan kualitas hunian. Program BSPS dilaksanakan di Kota Semarang sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Menurut Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015, angka kemiskinan Kota Semarang sebesar 20,82 persen atau sebanyak 367.848 jiwa penduduk miskin. Implementasi Program BSPS menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan nomor sebelas dari, yaitu perencanaan

pembangunan yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender.

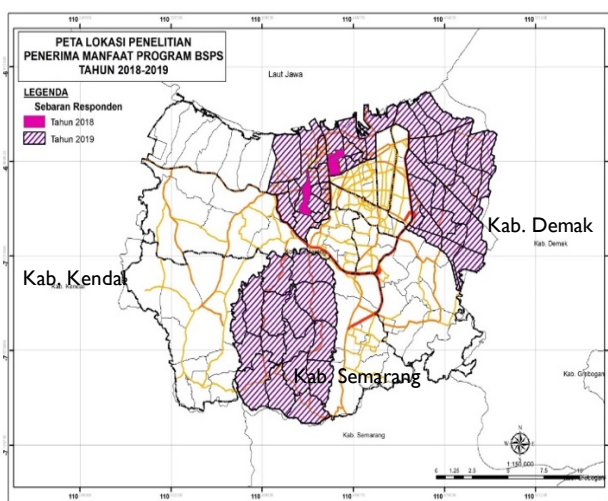
Pengarusutamaan gender menurut (Meier & Lombardo, 2013) adalah pendekatan tentang kesetaraan gender guna mengakomodir isu gender pada seluruh kebijakan, salah satunya kebijakan terkait pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas fisik hunian yakni program BSPS. Gender juga menjamin bahwa roadmap ketercapaian program menjadi lebih terukur, sehingga sasaran pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif (Esariti et al., 2019). Permasalahan terkait rumah yang memadai bukan hanya mengenai kuantitas rumah melainkan rendahnya kualitas rumah yang selama ini tersedia (Jiboye, 2011). Rumah tidak layak huni merupakan suatu hunian yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Kualitas rumah merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena terkait makna penting rumah bagi penghuninya. (Soaita, 2014) menyebutkan beberapa makna penting dari rumah diantaranya terkait dengan pengembangan keluarga, tempat kenyamanan dan kesejahteraan, perwujudan ekspresi emosional dalam mengaktualisasikan

identitas diri, sebagai alat kontrol dan upaya pengakuan akan kepemilikan ruang formal.

Program BSPS seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas hunian yang berdampak langsung bagi penerima bantuan baik dari segi fisik hunian maupun psikologis penghuninya. Berdasarkan uraian pernyataan diatas maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis makna rumah bagi penerima bantuan yang kemudian mempengaruhi bentuk perbaikan rumah. Hasil akhir dari studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Semarang, sebagai bentuk pembelajaran dari kegiatan BSPS pada tahun pelaksanaan 2018 dan 2019.

## METODA ANALISA

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, dengan kajian literatur digunakan sebagai kerangka analisis dalam pembahasan dan diskusi. Analisis deskriptif dipilih menjadi metoda untuk menginterpretasikan pola jawaban responden, baik dalam jawaban terbuka maupun penilaian responden dengan skor 1-5. Teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan pada tahun yang berbeda. Penerima manfaat program BSPS pada tahun 2018 melibatkan 26 responden di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Bulu Lor, dan Kelurahan Panggung Kidul, sedangkan pada penerima manfaat program BSPS tahun 2019 melibatkan 36 responden di enam kelurahan yaitu Kelurahan Pongangan, Kelurahan Kudu, Kelurahan Tambakharjo, Kelurahan Plamongsari, Kelurahan Kuningan dan Kelurahan Dadapsari. Peta lokasi penelitian bisa dilihat pada gambar 1.



Sumber: Bappeda Kota Semarang tahun 2011

**Gambar 1**  
**Peta Lokasi Penelitian**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

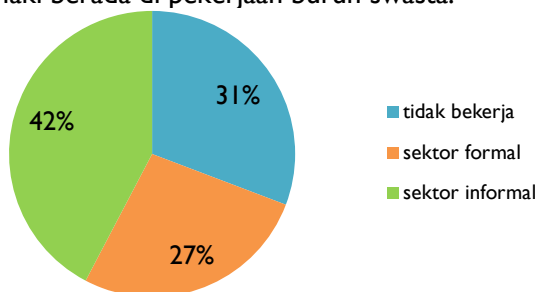
### Karakteristik Keluarga Penerima Bantuan pada Tahun 2018

Penelitian dilakukan pada tahun 2018 di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Bulu Lor, dan Kelurahan Panggung Kidul. Pengumpulan data melibatkan 26 responden kuesioner yang merupakan penerima manfaat program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) tahun 2018 dengan rentang usia responden yang beragam mulai dari 32 tahun hingga 72 tahun. Umumnya permukiman kumuh dengan rumah tidak layak huni (Jiboye, 2011) dihuni oleh masyarakat yang bekerja di sektor informal. Sektor informal menurut (BAPPENAS, 2009) adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan legal, tetapi tidak terdaftar. Menurut (Tunas & Peresthu, 2010), pekerja yang menggantungkan hidupnya melalui sektor informal memiliki resiko tinggi, seperti tidak ada jaminan secara hukum, tidak ada jaminan sosial, dan sangat bergantung pada jejaring sosial yang dimiliki. Pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal mendapatkan penghasilan yang tidak menentu. Penghasilannya hanya cukup untuk bertahan hidup, belum seluruhnya mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Dominasi responden sebagai pekerja serabutan, pedagang, serta buruh, seperti buruh swasta, buruh cuci, dan buruh bangunan (Gambar 2). (BAPPENAS, 2009) menyatakan bahwa sering kali sektor informal dikaitkan dengan kaum miskin kota yang tidak terdidik sehingga kaum miskin tersebut hanya mampu bekerja di sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan temuan di lapangan, dimana 50% responden memiliki keahlian tambahan yang meliputi supir, mekanik, bengkel kapal, menjahit, pertukangan, memasak, dan mencuci. Keahlian tambahan ini dimanfaatkan sebagai pekerjaan utama (46%), pekerjaan sampingan (38%), dan ada pula yang tidak memanfaatkan (16%). Alasan untuk tidak lagi menggunakan keahlian sebagai sumber penghasilan adalah karena sudah bekerja sebagai buruh swasta dan faktor usia sehingga tidak lagi mampu bekerja.

Program BSPS memiliki kriteria untuk dapat menjadi penerima manfaat, yaitu tingkat kemiskinan dan rumah yang layak untuk dihuni (Rakyat, 2016). Tingkat kemiskinan dapat diukur melalui persentase orang yang memiliki pendapatan sendiri, kepemilikan atas tempat tinggal, kecukupan dalam konsumsi nutrisi, dan akses pensiun (Bradshaw et al., 2017). Apabila dianalisis menggunakan standar upah minimum Kota Semarang tahun 2018, maka kondisi lapangan menunjukkan bahwa 85%

responden terindikasi memiliki penghasilan di bawah upah minimum. Dimana 50% dari total responden memiliki kisaran pendapatan keluarga kurang dari Rp1.000.000,00. Lalu 35% dari total responden memiliki kisaran pendapatan di antara Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 (Gambar 3).

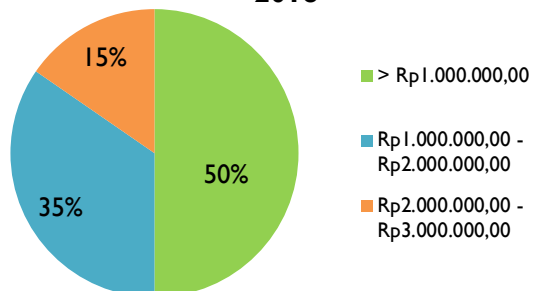
Berdasarkan temuan lapangan, responden dengan pendapatan kurang dari Rp1.000.000,00 meliputi lima mata pencaharian, yaitu tidak bekerja, pedagang, buruh swasta, swasta, dan laundry. Responden yang tidak bekerja merupakan lansia yang berusia 72 tahun (laki-laki), 66 tahun (perempuan), 65 tahun (perempuan), dan 64 tahun (perempuan). Maka untuk pendapatan yang dimiliki oleh lansia, dihitung berdasarkan besaran jumlah uang yang diberikan oleh anak untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pekerjaan lain yang memiliki pendapatan di bawah Rp1.000.000,00 adalah pedagang, buruh swasta, swasta, dan laundry, dengan dominasi responden yang termasuk dalam kelompok ini adalah perempuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2012), bahwa kesenjangan gender juga terlihat pada diskriminasi yang dialami perempuan di pasar tenaga kerja, seperti upah perempuan yang masih di bawah upah laki-laki untuk kelompok pekerjaan yang sama. Kondisi lapangan yang menunjukkan adanya perbedaan upah signifikan antara perempuan dan laki-laki berada di pekerjaan buruh swasta.



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020

**Gambar 2**

**Sektor Pekerjaan Penerima Manfaat Tahun 2018**



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020

**Gambar 3**

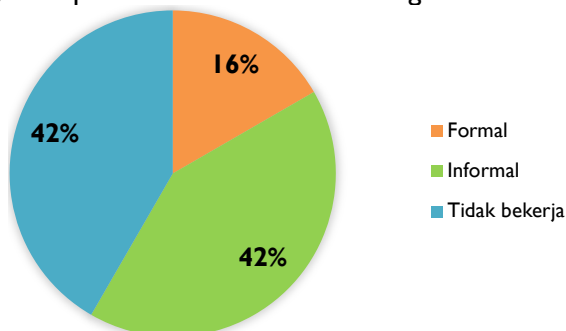
**Penghasilan Rata-Rata Sebulan Penerima Manfaat Tahun 2018**

Adanya keterbatasan secara finansial, menyebabkan responden kesulitan untuk menyisihkan pendapatan sebagai tabungan. Dari total 26 responden, hanya 4 responden yang memiliki tabungan berupa uang tunai. Mayoritas responden yang memiliki tabungan adalah rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan dari suami dan istri dengan dominasi pendapatan berkisar antara Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00. Responden yang memiliki uang tabungan, dapat menggunakan dana tersebut sebagai bentuk swadaya berupa uang. Namun, untuk responden yang tidak memiliki uang tabungan, maka umumnya akan mencari pinjaman dari kerabat maupun pihak luar atau tidak menambah modal berupa dana maupun material, melainkan menggunakan tenaga, khususnya dalam pertukangan dalam kegiatan perbaikan kondisi fisik rumah.

**Karakteristik Keluarga Penerima Bantuan pada Tahun 2019**

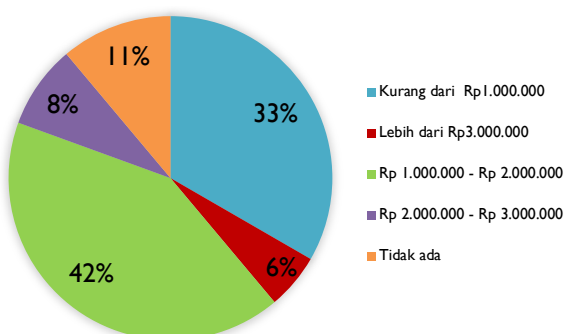
Kondisi rumah tangga penerima bantuan umumnya bekerja pada sektor informal dan tidak bekerja. Rentang usia responden yang beragam mulai dari 28 tahun hingga 80 tahun, dan dominasi merupakan pekerja pada sektor informal sebesar 42%. Umumnya responden yang bekerja pada sektor informal memiliki jenis pekerjaan diantaranya sebagai pedagang, buruh harian, dan pekerja serabutan. Selain itu, sebesar 42% responden merupakan ibu rumah tangga tanpa keahlian khusus. Responden yang bekerja pada sektor informal, keseluruhannya merupakan buruh pabrik. Menurut (BAPPENAS, 2009) masyarakat yang bekerja pada sektor informal memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus berguna untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga karena berperan sebagai alternatif pendapatan. Kondisi lapangan menunjukkan sebanyak 11 responden memiliki keahlian khusus seperti tukang bangunan, desain undangan, bengkel sepeda motor, pijat, menjahit, dan meubel. Seluruh responden menggunakan keahlian khusus yang dimiliki untuk bekerja, sebagian menggunakannya sebagai sumber penghasilan utama rumah tangga. Sementara itu, sumber pendapatan utama didominasi oleh perempuan yang bertatus sebagai kepala keluarga yaitu sebanyak 13 responden. Sumber pendapatan yang berasal dari laki-laki sebagai kepala keluarga yaitu sebanyak 9 responden, 7 responden memiliki sumber pendapatan yang berasal dari suami dan istri. Sisanya sebanyak 7 responden memiliki sumber pendapatan yang berasal dari anak mereka (lihat Gambar 4).

Tingkat kemiskinan dapat diukur menggunakan beberapa indikator diantaranya persentase masyarakat yang dengan pendapatan sendiri, hak milik tempat tinggal, tingkat konsumsi nutrisi, dan akses pada dana pensiun (Bradshaw et al., 2017). Pernyataan ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima BSPS yakni merupakan masyarakat dengan penghasilan rendah dan menghuni rumah dengan kondisi tidak layak huni. Standar yang digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat pada penelitian ini yaitu upah minimum Kota Semarang.



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020

**Gambar 4**  
**Sektor Pekerjaan Penerima Manfaat Tahun 2019**



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020

**Gambar 5**  
**Penghasilan Rata-Rata Sebulan Penerima Manfaat Tahun 2019**

Hasil observasi menunjukkan sebesar 96% responden (lihat Gambar 5) merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan perbulan kurang dari Rp. 3.000.000. Kelas pendapatan pada penelitian ini dibagi menjadi 5 kelas dengan dominasi pendapatan 42% responden berada di kelas Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000. Kelas pendapatan tertinggi kedua sebesar 33% responden dengan pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000. Sementara itu, terdapat 11% responden yang masuk dalam kelas tidak ada pendapatan umumnya merupakan lansia berusia 50 tahun, 57 tahun, 58

tahun, dan 80 tahun. Keempat responden tinggal bersama anaknya, sehingga pendapatan berasal dari anak dengan nominal yang tidak menentu setiap bulannya. Kondisi ekonomi berpengaruh pada kemampuan swadaya yang dapat diberikan oleh masing-masing rumah tangga selama kegiatan peningkatan kualitas hunian berlangsung. Seluruh responden menyatakan tidak memiliki tabungan baik dalam bentuk tunai maupun tabungan di bank. Ketidakterediaan dana tabungan ini berpengaruh pada kemampuan masing-masing rumah tangga untuk berswadaya dalam bentuk uang. Responden umumnya menyatakan bahwa perbaikan rumah dilakukan dengan dana murni bantuan dengan keswadayaan yang dapat mereka lakukan yaitu dalam bentuk tenaga.

### Persepsi Penerima Bantuan tentang Rumah dan Lingkungan yang Ideal

Rumah ideal menurut (Undang Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011) adalah rumah yang diharapkan mampu berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya. Rumah yang ideal menurut (Parsell, 2012), (Acioly & Horwood, 2010) adalah rumah yang memiliki arti sosial, spiritual, dan tingkat material. Oleh karena itu, rumah dapat dilihat dari sudut pandang secara fisik bangunan dan secara psikologis penghuninya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kualitas hunian yang baik menjadi penting sehingga pemerintah membuat strategi perbaikan rumah secara swadaya. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggal di permukiman kumuh, memiliki pandangan yang lebih sederhana terkait rumah yang ideal (Tunas & Peresthu, 2010). Secara fisik, mayoritas responden penerima bantuan tahun 2018 mengharapkan rumah untuk berteduh (81% dari total responden), meminimalisir pengeluaran (15% dari total responden), berlindung dari bencana (8% dari total responden), dan tempat ruang usaha (4% dari total responden). Jawaban ini mencerminkan bahwa responden memaknai rumah sebagai tempat yang memberikan rasa aman dan diharapkan mampu mendukung ekonomi keluarga. Keterbatasan dana tersebut menyebabkan responden terus bertahan dalam rumah meskipun secara struktur sudah termakan usia. Pandangan rumah selanjutnya dapat ditinjau dari sisi psikologi, rumah diharapkan memberikan kenyamanan bagi keluarga (81% dari total responden) dan sebagai tempat untuk membesarkan anak (15% dari total responden). Berangkat dari jawaban kenyamanan

keluarga menjadi salah satu mayoritas fungsi rumah menurut responden, maka melalui program BSPS ini, responden melakukan upaya untuk meningkatkan rasa nyaman, seperti mengupayakan agar rumah tidak lagi bocor, tidak banjir, dan meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni.

Sedangkan bagi penerima bantuan tahun 2019, berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, makna rumah bagi masyarakat menghasilkan jawaban yang beragam. Jawaban yang mendominasi terkait makna rumah adalah sebagai tempat berteduh dan berlindung. Responden juga memaknai rumah sebagai upaya untuk meminimalisir pengeluaran. Kepemilikan rumah menjadi penting bagi responden (Parsell, 2012), (Way, 2020) karena dengan begitu mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk biaya sewa. Selain karena keterbatasan dana yang dimiliki karena biaya sewa yang setiap tahunnya meningkat, tidak tersedianya tabungan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk bertahan dalam kondisi rumah yang tidak ideal. Jawaban mengenai makna rumah juga tidak hanya muncul terkait dengan fisik rumah, melainkan makna rumah secara psikologis penghuninya. Makna rumah menurut lima responden yakni merupakan sebuah tempat dimana mereka merasa aman secara fisik dan psikologis, rumah juga bermakna sebagai identitas diri pemiliknya, dan tempat membangun kebaikan keluarga. Sebagian responden memaknai bahwa rumah mempengaruhi pandangan orang lain terhadap pemiliknya. Hal tersebut yang mendorong masyarakat untuk terus berupaya memperbaiki kondisi rumah dengan segala kemampuan yang dapat diberikan (Ellen & Regan, 2013). Berdasarkan jawaban responden terkait makna rumah bagi mereka, dapat diambil kesimpulan mengenai rumah ideal menurut masyarakat. Rumah ideal atau rumah yang layak untuk dihuni dapat memberikan keamanan bagi penghuninya baik secara fisik maupun psikologis. Rumah tersebut selain menjadi tempat berlindung bagi raga juga merupakan tempat berlindung bagi jiwa. Oleh sebab itu, rumah menjadi tempat untuk menumbuhkan kebaikan dalam diri pemilik, keluarga, dan identitas di lingkungan tempat tinggal. Bagi responden, rumah ideal secara fisik merupakan rumah yang tersusun dari tembok berupa batu bata, serta memiliki atap yang aman dari kebocoran. Hal ini juga sejalan dengan bentuk perbaikan yang dilakukan oleh penerima bantuan pada Tabel 1.

Survei juga dilakukan dengan penilaian masyarakat tentang persepsi mengenai rumah. Bagi penerima bantuan BSPS tahun 2018 dan 2019, menyetujui hal yang sama tentang fungsi rumah.

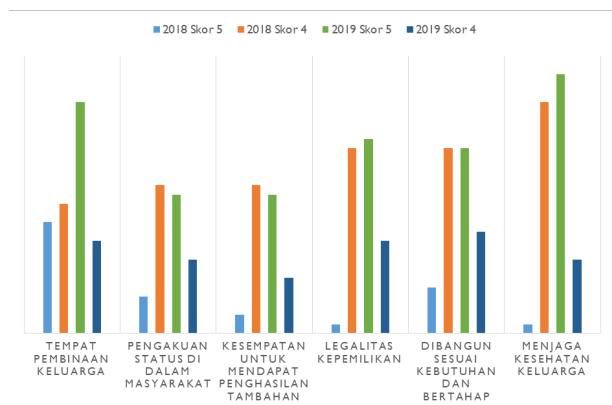
Persepsi tersebut diantaranya rumah sebagai tempat pembinaan keluarga, pengakuan status, menciptakan penghasilan tambahan, legalitas kepemilikan, dibangun sesuai kebutuhan dan bertahap, serta tempat untuk menjaga kesehatan keluarga. Skor tertinggi pada penilaian ini adalah rumah sebagai tempat pembinaan keluarga dan rumah berfungsi untuk menjaga kesehatan keluarga (seperti yang terlihat pada Gambar 6 di bawah ini). Penilaian ini sesuai dengan makna rumah ideal menurut responden, baik secara fisik maupun psikologis.

### **Definisi Lingkungan Ideal**

Lingkungan ideal diatur dalam (Undang Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011) memiliki definisi lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, serta tersedianya sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai syarat baku mutu lingkungan. Lingkungan yang ideal juga adalah lingkungan yang mampu mendukung tumbuh kembang anak dan menghindarkan dari masalah perilaku bagi tumbuh kembang anak (Tan, 2012) Lingkungan ideal yang difokuskan dalam penelitian ini adalah tersedianya sarana prasarana umum, serta tingkat keamanan dan wadah bermasyarakat di lingkungan. Hal ini penting, karena konteks pembangunan rumah ideal tidak terlepas dari keterpaduan terhadap penyediaan sarana prasarana lingkungan. Interaksi antara aktivitas di dalam rumah dan aktivitas luar rumah menyeimbangkan kebutuhan dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga (Ward & King, 2016), (Sullivan & Ward, 2012), (Way, 2020).

Apabila dibandingkan, jawaban responden tahun 2018 dan 2019 sama saja. Lingkungan ideal adalah yang memiliki kelengkapan fasilitas sosial yang dapat dijangkau sampai dengan radius 5 kilometer. Namun, pada lokasi responden di 2018, salah satu permasalahan utama lingkungan adalah banjir dan tingginya angka kriminalitas. Adapun upaya yang dilakukan responden untuk mengatasi banjir adalah meninggikan rumah. Sementara, untuk permasalahan pencurian, masyarakat melakukan siskamling secara rutin. Usaha lain yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kondisi ideal lingkungan di luar permasalahan yang ada adalah dengan mengadakan pertemuan RT/RW secara rutin, melaksanakan pengajian lingkungan, kegiatan PKK, dan arisan lingkungan RT. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi wadah bersosialisasi bagi masyarakat, karena lingkungan juga turut berperan dalam pembentukan relasi dan tumbuh kembang anak (Karsten, 2007), (Wu, 2010). Hasil

kuesioner juga menunjukkan bahwa bersosialisasi dengan tetangga mampu menjamin kenyamanan tinggal di lingkungan rumah eksisting. Bahkan beberapa responden menyatakan bahwa tetangga merupakan keluarga paling dekat di saat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, lingkungan turut menjadi pembentuk dalam kenyamanan bertempat tinggal bagi masyarakat.



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020

### Gambar 6 Makna Rumah Bagi Penerima BSPS Tahun 2018 dan Tahun 2019

Hasil penyebaran kuesioner paa penerima bantuan tahun 2019 menunjukkan 94% atau 32 responden menyatakan lingkungan mereka terbebas dari ancaman bencana baik itu banjir ataupun genangan air pada musim hujan. Sementara 2 responden lainnya menyatakan masalah di lingkungan tempat tinggal akibat posisi rumah yang rendah, sehingga ketika curah hujan tinggi sekitar rumah akan tergenang air. Selain keamanan lingkungan dari ancaman bencana, lingkungan yang ideal juga merupakan lingkungan yang aman dari tindak kriminalitas. Kondisi lapangan menunjukkan, lingkungan yang mereka huni terbebas dari ancaman tindak kriminalitas, sehingga 100% responden merasa aman bertempat tinggal di lingkungannya. Responden memberikan nilai yang tinggi terhadap ketersediaan prasarana di lingkungan mereka. Hal ini ditunjukkan dari hasil skor pada masing-masing faktor yang didominasi oleh skor 5. Responden menyatakan bahwa jaringan air bersih, listrik, persampahan, dan drainase dalam kondisi baik. Sebagian besar responden penerima bantuan tahun 2019 menyatakan bahwa kelengkapan sarana menjadi faktor yang lebih penting daripada kedekatan lokasi sarana. Hal ini menunjukkan adanya kondisi ekonomi yang lebih baik. Lokasi tidak lagi menjadi hal yang krusial, namun waktu tempuh untuk menjangkau pelayanan menjadi lebih penting.

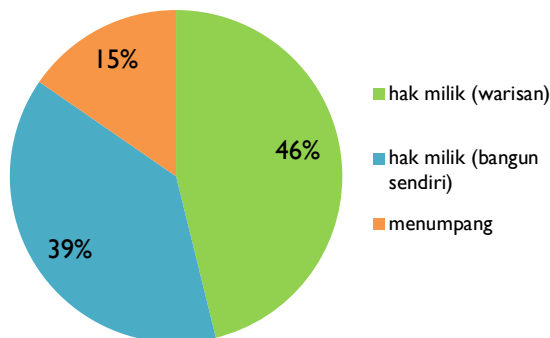
Artinya sarana seharusnya dapat ditempuh dengan moda kendaraan pribadi beroda dua. Khusus persampahan, terdapat jadwal pengangkutan sampah 2-3 kali setiap bulannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemauan masyarakat untuk membayar iuran, sehingga sampah dapat diangkut dengan rutin. Iuran tersebut umumnya dibayarkan pada saat kegiatan rutin RT yang dilaksanakan setiap bulannya. Selain secara fisik, lingkungan ideal juga dapat digambarkan dari terjalinnya hubungan yang baik antar masyarakat. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 100% masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lingkungannya mulai dari pengajian, kumpul rutin RT, kumpul PKK, dan kegiatan lainnya yang beragam di setiap lokasi.

### Usaha yang Dilakukan Rumah Tangga Penerima Bantuan untuk Mencapai Kondisi Ideal

Indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan menurut (Bradshaw et al., 2017) salah satunya melalui data kepemilikan tempat tinggal oleh masyarakat. Kepemilikan atas tempat tinggal juga merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan. Berdasarkan hasil kuesioner dari penerima BSPS tahun 2018, menunjukkan bahwa 85% responden menyatakan bahwa mereka menempati rumah atas hak milik pribadi, sedangkan 15% responden lainnya menumpang di rumah orangtua atau kerabat yang menjadi penerima manfaat. Adapun responden yang memiliki hak milik pribadi dapat dirincikan menjadi 55% mendapatkan rumah secara warisan dan 45% lainnya membangun sendiri rumah mereka. Seluruh responden telah menghuni rumah tersebut lebih dari 10 tahun dan bahkan ada responden yang tinggal di rumah tersebut sejak lahir. Lamanya menghuni rumah menjadi alasan utama untuk mempertahankan lokasi rumah, sehingga upaya yang dilakukan lebih kepada perbaikan kondisi fisik rumah. Ini berarti rumah tidak hanya berfungsi sebagai status sosial namun rumah telah memberikan penghidupan kepada keluarga mereka (Ward & King, 2016).

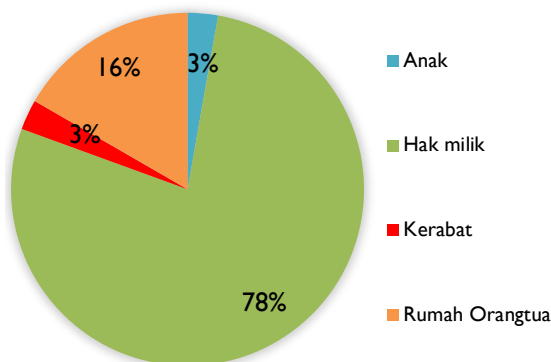
Berdasarkan survei lapangan, yang dilakukan pada penerima bantuan BSPS tahun 2019, 78% responden menyatakan bahwa rumah yang mereka tempati berstatus hak milik (Gambar 7 & 8). Sementara, 28% lainnya merupakan rumah atas nama orangtua, anak, atau kerabat yang menjadi penerima bantuan. Responden dengan status kepemilikan rumah atas nama orangtua menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan warisan. Sebanyak 33 dari 36 responden menghuni rumah lebih dari 10 tahun atau tinggal di rumah tersebut

semenjak lahir. Oleh sebab itu, umumnya responden menyatakan bahwa mereka mengupayakan segala cara agar dapat memperbaiki rumah mulai dari mencari dana tambahan untuk swadaya maupun berswadaya dengan tenaga.



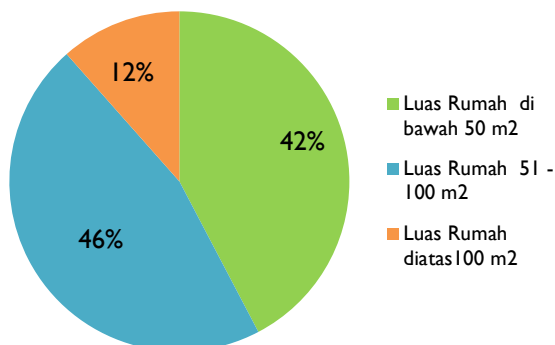
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020

**Gambar 7**  
**Status Kepemilikan Rumah Penerima Manfaat Tahun 2018**



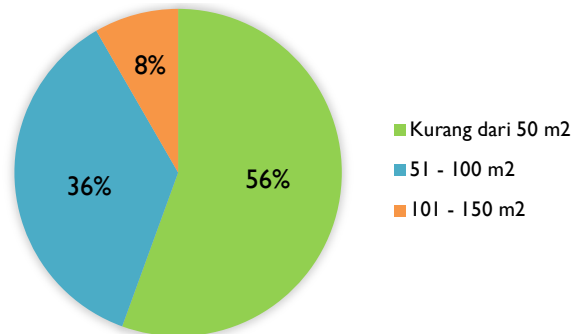
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020

**Gambar 8**  
**Status Kepemilikan Rumah Penerima Manfaat Tahun 2019**



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020

**Gambar 9**  
**Luas Rumah Penerima Manfaat Tahun 2018**



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020

**Gambar 10**  
**Luas Rumah Penerima Manfaat Tahun 2019**

Luas minimal rumah layak huni menurut Permen PUPR tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu minimal 9m<sup>2</sup>/jiwa (Lihat Gambar 9 & 10). Kondisi lapangan menunjukkan bahwa rata-rata rumah tersebut dihuni oleh 5 orang, maka luas minimal satu rumah adalah 45 m<sup>2</sup>. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada penerima BSPS tahun 2019 terdapat 42% responden yang bertempat tinggal di bawah 50m<sup>2</sup>, sedangkan sisanya menempati rumah dengan luasan 51-100m<sup>2</sup> (46% responden) dan lebih dari 100m<sup>2</sup> (12% responden).

Denah rumah yang jamak ditemukan pada jawaban responden terdiri dari teras, ruang tamu, dapur, satu kamar tidur, dan satu kamar mandi. Temuan lapangan menunjukkan, masih terdapat dua rumah yang tidak memiliki kamar mandi di dalam rumah, sehingga untuk kegiatan mandi, cuci, kakus dilakukan di toilet komunal. Lalu terdapat penggabungan fungsi ruang yang dilakukan oleh responden yaitu penggabungan fungsi antara ruang tamu dan ruang keluarga serta dapur dan ruang makan. Ini merupakan salah satu upaya untuk efektivitas penggunaan ruang dan optimalisasi luas ruang yang dimiliki. Namun secara struktur bangunan, rumah yang ditempati mengalami beberapa permasalahan seperti dinding yang mulai lapuk, atap bocor, maupun penurunan posisi rumah sebagai akibat dari penurunan muka tanah di pesisir Kota Semarang. Melalui program BSPS, bentuk perbaikan rumah yang umum dilakukan oleh penerima bantuan meliputi atap, lantai, dan dinding. Terdapat beberapa rumah tangga yang melakukan perbaikan pada ruang tertentu misalnya penambahan kamar, saluran air, dan menambah pagar. Berikut merupakan rincian perbaikan yang dilakukan oleh penerima manfaat program BSPS.

**Tabel I**  
**Jenis Perbaikan Rumah**

Tahun	Jenis Perbaikan	Jumlah	Masalah
2018	Perbaikan pada dinding	3	Kondisi dinding non permanen, lapuk, dan hampir roboh
	Perbaikan pada atap	7	Kondisi atap bocor
	Perbaikan pada lantai	5	Kondisi lantai berupa tanah
	Penambahan kamar	1	Kondisi rumah tidak memiliki kamar
	Perbaikan saluran air	1	Kondisi pipa saluran air bermasalah
	Perbaikan lainnya	9	Peninggian rumah, pembangunan ulang karena hampir roboh, atau pembuatan pagar.
	2019	Peninggian rumah	9
Perbaikan dinding		5	Kondisi dinding non permanen dan hampir roboh
Perbaikan dinding, atap, dan lantai		1	Kondisi dinding non permanen dan hampir roboh. Kondisi atap bocor, dan lantai yang terbuat dari tanah
Perbaikan dinding, dan atap		14	Kondisi dinding non permanen dan hampir roboh. Kondisi atap bocor
Perbaikan seluruh bagian rumah		5	Kondisi dinding non permanen dan hampir roboh, lantai tanah, atap bocor, pintu dan jendela lapuk
Perbaikan struktur atap		2	Kondisi atap bocor, peninggian atap, dan struktur penyangga hampir roboh.

Sumber: Hasil Kuesioner, diolah penulis tahun 2020.

Perubahan paling banyak terjadi pada dinding yang sebelumnya terbuat dari papan, kayu, dan triplek diubah menjadi batu bata atau batako. Posisi rumah juga ditinggikan agar tidak lagi tenggelam karena tinggi jalan yang terus dinaikkan sebagai dampak dari penurunan muka tanah pesisir Kota Semarang. Selain itu, atap juga diganti dari genteng tanah liat menjadi asbes. Asbes menjadi alternatif material atap karena harganya lebih murah dan pemasangan yang mudah. Padahal, saat ini penggunaan asbes dihimbau untuk dihindari karena menimbulkan resiko kesehatan (International Labor Organization, 2002). Selain beresiko bagi kesehatan, bahan asbes juga akan mempercepat laju api ketika terjadi kebakaran Mitlin dalam (Melin, 2014) sehingga tidak direkomendasikan untuk rumah padat penduduk. Namun karena dana yang diberikan cenderung tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan dengan kualitas material bahan bangunan yang baik, maka alternatif penggunaan asbes digunakan. Adanya indikasi perbedaan kedudukan yang dialami antara penerima manfaat dan pihak penyelenggara, turut menyebabkan penerima manfaat cenderung menerima meskipun bertentangan dengan kemauan yang dimiliki.

(a) Kondisi sebelum Dilakukan Proses Perbaikan



(b) Kondisi sesudah Dilakukan Proses Perbaikan



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2018

**Gambar II**  
**Kondisi Rumah Penerima Manfaat Program BPS Tahun 2018**

Bentuk perbaikan rumah yang dilakukan oleh penerima bantuan umumnya pada dinding dan struktur atap (Gambar II). Terdapat beberapa rumah tangga yang melakukan perbaikan pada ruang-ruang tertentu seperti dapur dan kamar mandi. Perbaikan dilakukan dengan beberapa alasan diantaranya struktur penyangga atap yang sudah lapuk dan bocor, serta dinding yang sebelumnya terbuat dari papan atau bambu. Jenis perbaikan berupa peninggian rumah dilakukan oleh responden yang tinggal di daerah pesisir yaitu Kecamatan Semarang Utara sebanyak 8 responden, sementara

satu responden lainnya berada di Kecamatan Genuk. Perbedaan yang dilakukan antara perbaikan seluruh bagian rumah dengan perbaikan yang hanya dilakukan pada bagian-bagian tertentu rumah yakni terletak pada perubahan komponennya. Perbaikan yang dilakukan hanya pada dinding menunjukkan bahwa atap dan lantai masih memiliki kondisi yang sama seperti sebelum program. Kondisi di lapangan menunjukkan jarang ditemukan rumah tangga yang melakukan perbaikan pada lantai rumah dengan alasan keterbatasan biaya baik dari dana bantuan yang terbatas maupun tidak tersedianya dana swadaya.

Berbeda apabila penerima manfaat memiliki tambahan dana berupa uang tunai ataupun material untuk melakukan swadaya. Responden penerima manfaat program BSPS tahun 2018 menunjukkan terdapat empat responden yang memakai uang tabungan sebagai dana swadaya. Perbedaan ini dapat terlihat dari banyaknya bagian yang diperbaiki dan juga peningkatan kualitas yang dilakukan. Contohnya adalah apabila responden mempunyai dana mandiri yang berasal dari tabungan atau bantuan keluarga besar, maka perbaikan lantai rumah dapat menggunakan material lebih baik, yaitu lantai keramik. Sehingga dari fakta ini, dapat disimpulkan, bahwa BSPS telah berjalan efektif sebagai dana stimulan, yaitu mampu menumbuhkan potensi masyarakat penerima bantuan. Yang umum terjadi adalah pemanfaatan dana tambahan dari keluarga, penambahan kegiatan pembangunan rumah dengan meminta bantuan tenaga tetangga sekitar menggunakan sistem gilir.

## KESIMPULAN

Artikel ini telah memaparkan dengan deskripsi detail pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Swadaya di 8 kelurahan di Kota Semarang. Jelas bahwa makna rumah lebih dominan pada pengembangan keluarga, dalam hal ini adalah penguatan kegiatan ekonomi produktif yang dapat menjadi potensi tambahan penghasilan. Artinya, upaya yang dilakukan dengan pemanfaatan dana hibah BSPS fokus pada perubahan fisik utama yang mendukung penguatan struktur bangunan rumah. Apabila hal ini telah tercapai, persepsi rumah tangga miskin penerima bantuan selanjutnya menyatakan bahwa pengembangan keluarga untuk mendukung penghidupan (*livelihood*) akan terjadi. Makna rumah selanjutnya yang dapat disimpulkan adalah pentingnya adanya keterpaduan kondisi lingkungan yang aman, nyaman dan didukung oleh lengkapnya sarana prasarana untuk menjamin akses pada peningkatan kualitas hidup keluarga. Singkatnya, rumah berfungsi secara fisik, sosial dan spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acioly, C., & Horwood, C. (2010). A Practical Guide for Conducting: Housing Profiles. In *UN Habitat*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2012). *Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): Kajian Awal*. <https://doi.org/10.1039/c11c20670b>
- BAPPENAS. (2009). *Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagaakerjaan*. [https://www.bappenas.go.id/files/3513/5027/3734/kajian-peran-sektor-informal2010090310304327490\\_\\_20110518101103\\_\\_3050\\_\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3513/5027/3734/kajian-peran-sektor-informal2010090310304327490__20110518101103__3050__0.pdf)
- Bradshaw, S., Chant, S., & Linneker, B. (2017). Gender and poverty: what we know, don't know, and need to know for Agenda 2030. *Gender, Place & Culture*, 0524(November), 1–22. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2017.1395821>
- Ellen, G., & Regan, O. (2013). Do Vouchers Help Low-Income Households Live in Safer Neighborhoods? Evidence on the Housing Choice Voucher Program Author (s): Michael C. Lens, Ingrid Gould Ellen and Katherine O' Regan Reviewed work (s): Source: Cityscape, Vol. 13, No. 3, C. *Cityscape: A Journal of Policy Development and Research*, 13(3), 135–159.
- Esariti, L., Haulah, L., & Sunarti, S. (2019). Pengarusutamaan Gender Dalam Program Gerbang Hebat Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Semarang. *Tataloka*, 21(1), 140. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.1.140-152>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 11 10 (2011). <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>
- International Labor Organization. (2002). *Pemakaian Asbes Secara Aman*.
- Jiboye, A. D. (2011). Achieving Sustainable Housing Development in Nigeria: A Critical Challenge to Governance. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(9), 121–127.
- Karsten, L. (2007). Housing as a way of life: Towards an understanding of middle-class families' preference for an urban residential location. *Housing Studies*, 22(1), 83–98. <https://doi.org/10.1080/02673030601024630>
- Meier, P., & Lombardo, E. (2013). Gender quotas, gender mainstreaming and gender relations in

- politics. *Political Science*, 65(1), 46–62. <https://doi.org/10.1177/0032318713488114>
- Melin, H. M. and M. (2014). Claiming the City Civil Society Mobilisation by the Urban Poor. In *Uppsala Centre for Sustainable Development*. [www.csduppsala.uu.se](http://www.csduppsala.uu.se)
- Parsell, C. (2012). Home is Where the House is: The Meaning of Home for People Sleeping Rough. *Housing Studies*, 27(2), 159–173. <https://doi.org/10.1080/02673037.2012.632621>
- Rakyat, K. P. U. dan P. (2016). *Materi Pelatihan Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan - Bantuan Rumah Swadaya*.
- Soaita, A. M. (2014). The meaning of home in Romania: views from urban owner–occupiers. *Journal of Housing and the Built Environment*, 30(1), 69–85. <https://doi.org/10.1007/s10901-014-9396-3>
- Sullivan, E., & Ward, P. M. (2012). Sustainable housing applications and policies for low-income self-build and housing rehab. *Habitat International*, 36(2), 312–323. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.10.009>
- Tan, T. H. (2012). Meeting first-time buyers' housing needs and preferences in greater Kuala Lumpur. *Cities*, 29(6), 389–396. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.11.016>
- Tunas, D., & Peresthu, A. (2010). The self-help housing in Indonesia: The only option for the poor? *Habitat International*, 34(3), 315–322. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.11.007>
- Ward, S. J., & King, L. A. (2016). Poor but happy? Income, happiness, and experienced and expected meaning in life. *Social Psychological and Personality Science*, 7(5), 463–470. <https://doi.org/10.1177/1948550615627865>
- Way, A. K. (2020). Meaning/fulness through Family: Discourses of Work among Poor and Working Class Youth. *Western Journal of Communication*, 84(5), 641–659. <https://doi.org/10.1080/10570314.2019.1688859>
- Wu, F. (2010). Housing environment preference of young consumers in Guangzhou, China: Using the analytic hierarchy process. *Property Management*, 28(3), 174–192. <https://doi.org/10.1108/02637471011051318>